

BAB I

ENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

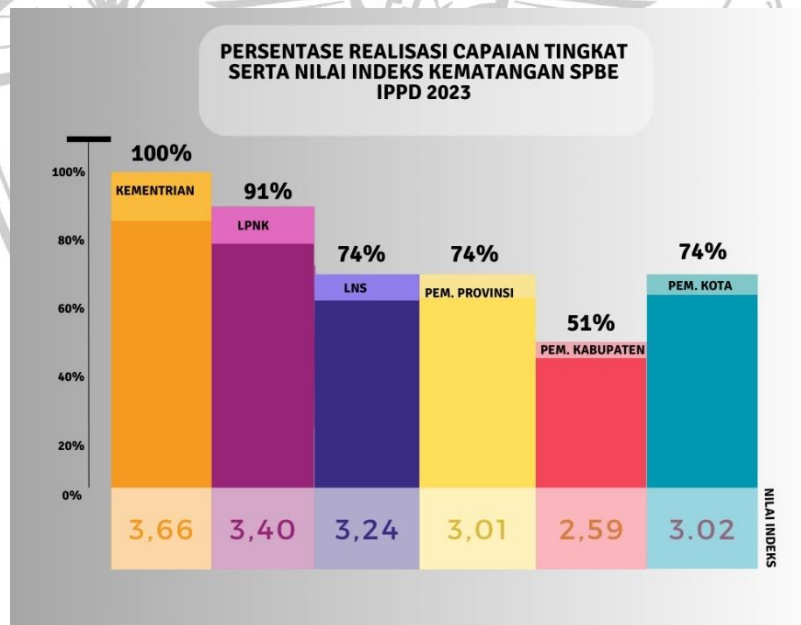
Dalam era digital yang berkembang pesat, transformasi pelayanan publik menjadi kebutuhan utama bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuka peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik, memastikan efisiensi administrasi, dan memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Gafar & Nurrahman, 2024). Bagi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan wilayah yang tersebar luas, tantangan dalam menyediakan layanan publik yang merata dan efisien menjadi tantangan besar. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik hadir sebagai solusi yang dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, baik kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah sendiri. SPBE di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2018, yang memberikan pedoman lebih rinci terkait implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE dirancang untuk menciptakan layanan pemerintahan yang terpadu dan sinergis, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah (Arief, & Yunus Abbas, 2021).

Penerapan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuka peluang bagi pemerintah untuk berinovasi dalam pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sistem yang mengintegrasikan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan layanan kepada berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, aparatur sipil negara, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan diterapkannya SPBE, pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, dengan menggunakan platform elektronik, proses administrasi dapat dilakukan secara online, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk pengurusan dokumen

dan permohonan layanan. serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui sistem pengawasan serta pengaduan berbasis digital (Aushap et al., 2023).

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamankan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE (Widia et al., 2021). Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Pada tahun 2023, persentase IPPD yang mencapai Tingkat Kematangan SPBE dengan predikat “Baik” ditargetkan sebesar 95% untuk Instansi Pusat, 70% untuk Pemerintah Provinsi, dan 40% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut Perbandingan persentase target dan realisasi capaian Tingkat serta nilai indeks Kematangan SPBE IPPD :

Gambar 1.1 Persentase Realisasi Capaian Tingkat Serta Nilai Indeks Kematangan SPBE IPPD 2023



Sumber: menpan.go.id dan diolah oleh penulis

Jika kita membandingkan hasil penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan kategori, Kementerian mencapai rerata indeks kematangan tertinggi sebesar 3,66 yang termasuk ke dalam predikat “Sangat Baik”. Hampir seluruh kategori yaitu Kementerian, LPNK, LNS, Instansi Lainnya, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota juga memiliki rerata indeks yang telah mencapai predikat "Baik". Namun, kategori Pemerintah Kabupaten memiliki rerata indeks kematangan terendah, yaitu 2,59, yang berada di ambang batas atas predikat “Kurang”. Angka ini mengindikasikan adanya tantangan yang lebih besar dalam penerapan SPBE di tingkat kabupaten. Rendahnya indeks ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia yang belum terlatih sepenuhnya, serta kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung transformasi digital di wilayah kabupaten. Berikut Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur:

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

NO	NAMA INSTANSI	INDEKS	NO	NAMA INSTANSI	INDEKS	NO	NAMA INSTANSI	INDEKS
1.	PEMKAB GERSIK	4,28	11	PEMKAB . PASURUAN	2,47	21	PEMKAB BOJONEGORO	3,65
2.	PEMKAB MOJOKERTO	3,52	12	PEMKAB PROBOLINGGO	3,33	22	PEMKAB TUBAN	3,90
3.	PEMKAB SIDOARJO	3,11	13	PEMKAB LUMAJANG	2,93	23	PEMKAB LAMONGAN	3,96
4.	PEMKAB JOMBANG	3,49	14	PEMKAB KEDIRI	4,27	24	PEMKAB MALANG	3,82
5.	PEMKAB SAMPANG	3,57	15	PEMKAB TULUNGAGUNG	3,09	25	PEMKAB PACITAN	3,34
6.	PEMKAB PAMEKASAN	2,89	16	PEMKAB NGANJUK	3,62	26	PEMKAB JEMBER	2,56
7.	PEMKAB SUMENEP	3,18	17	PEMKAB TRENGGALEK	4,21	27	PEMKAB PONOROGO	2,94
8.	PEMKAB BANGKALAN	2,63	18	PEMKAB . BLITAR	3,63	28	PEMKAB BANYUWANGI	4,50
9.	PEMKAB BONDOWOSO	2,90	19	PEMKAB MADIUN	4,30	29	PEMKAB MAGETAN	2,76
10.	PEMKAB SITUBONDO	4,17 S	20	PEMKAB NGAWI	3,23			

Sumber : menpan.go.id dan diolah oleh penulis

Tabel di atas menunjukkan hasil penilaian indeks kematangan SPBE pada tingkat pemerintah kabupaten yang diperoleh dari data menpan dan kemudian diolah oleh penulis. Secara umum, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam

tingkat pencapaian, mulai dari kategori “**Sangat Baik**” hingga “**Kurang**”, mencerminkan perbedaan kemampuan dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik di masing-masing kabupaten. **Pemkab Banyuwangi** menempati posisi tertinggi dengan indeks **4,50** kemudiandisusul oleh **Pemkab Madiun (4,30)** dan **Pemkab Gresik (4,28)**, dst yang masuk dalam kategori “**Sangat Baik**”. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten tersebut berhasil memanfaatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, inovatif, dan transparan. Sebagian besar kabupaten lainnya berada dalam kategori “**Baik**”, dengan indeks berkisar antara **3,99 – 3,00** yaitu Kabupaten seperti **Lamongan (3,96)**, **Taban (3,90)**, dan **Malang (3,82)**, dst menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam implementasi SPBE. Hal ini mencerminkan kesiapan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut, terutama dalam integrasi sistem dan peningkatan layanan publik berbasis elektronik. Namun, beberapa kabupaten memiliki indeks yang bisa dikatakan dibawah dari kategori baik, seperti **Pemkab Pasuruan (2,47)**, **Pemkab Jember (2,56)**, **Pemkab Bangkalan (2,63)** dan **Pemkab Magetan (2,76)**. Capaian ini mengindikasikan adanya tantangan besar yang perlu segera diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya alokasi anggaran untuk mendukung transformasi digital. Meski demikian, kabupaten seperti **Bangkalan** dan **Magetan**, yang berada di ambang batas kategori “**Cukup**”, memiliki peluang besar untuk melakukan perbaikan dengan lebih meningkatkan kualitas penerapan sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis Elektronik.

Kemudian dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Magetan juga menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 1 ayat (9) bahwa: “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada

pengguna SPBE.” Dengan demikian, regulasi ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, SPBE diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, memperluas akses layanan bagi masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan (Gamandura, 2020).

Di Kecamatan Panekan Kab. Magetan telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, salah satunya adalah Desa Tapak menyediakan situs *website* resmi untuk dapat diakses oleh masyarakat melalui website tapak.magetan.go.id yang diharapkan dapat diakses untuk meningkatkan kualitas layanan dan membuat informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Diluncurkannya *website* resmi tersebut bertujuan untuk membuka ketersediaan akses pelayanan secara online sekaligus informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menjembatani komunikasi antara Pemerintah Desa Tapak dengan masyarakat guna membangun ruang atau media aspirasi warga. Apabila penerapan SPBE tersebut berjalan dengan lancar dan baik, maka akan sangat menunjang pelayanan yang integritas dan keterbukaan informasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun ternyata penggunaan *website* ini juga belum optimal sehingga masih banyak pelayanan pemerintahan yang tidak diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa Tapak.

Tabel 1.2 Peringkat Penggunaan Website Kategori Umum Kec. Panekan

No.	Nama Desa	Web Desa	Total Nilai
1.	Desa Terung	terung.magetan.go.id	820
2.	Desa Rejomulyo	rejomulyopanekan.magetan.go.id	302
3.	Desa Wates	wates.magetan.go.id	285
4.	Desa Manjung	manjungpanekan.magetan.go.id	239
5.	Desa Jabung	jabung.magetan.go.id	85
6.	Desa Ceopoko	cepoko.magetan.go.id	80
7.	Desa Turi	turi.magetan.go.id	68
8.	Desa Tanjungsari	tanjungsari.magetan.go.id	50
9.	Kelurahan Panekan	panekan.magetan.go.id	36
10.	Desa Banjarejo	banjarejopanekan.magetan.go.id	33
11.	Desa Bedagung	bedagung.magetan.go.id	27
12.	Desa Sumberdodol	sumberdodol.magetan.go.id	21
13.	Desa Tapak	tapak.magetan.go.id	15
14.	Desa Sidowayah	sidowayah.magetan.go.id	15
15.	Desa Milangsri	milangsri.magetan.go.id	15
16.	Desa Ngiliran	ngiliran.magetan.go.id	0
17.	Desa Sukowidi	sukowidipanekan.magetan.go.id	0

Sumber : Sideskel.magetan.go.id

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari Sideskel Kabupaten Magetan terkait peringkat penggunaan Website Kategori Umum Kec. Panekan, Ada 4 desa yang memiliki total nilai tinggi yaitu Desa Terung dengan total nilai 820, Desa Rejomulyo dengan total nilai 302, Desa Wates dengan total nilai 285, serta Desa Manjung dengan total nilai 239 yang menggunakan website desa secara aktif dan terdapat informasi data yang lengkap mengenai desa serta pelayanan yang disajikan dalam web desa tersebut. Maka bisa dibilang desa dengan nilai total tinggi menunjukkan keaktifan dan kualitas pelayanan untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan dan mendukung pelayanan publik. Kemudian di dalam data tabel diatas ada beberapa desa yang memiliki total nilai yang rendah, salah satunya adalah Desa Tapak yang hanya memiliki total nilai 15. Desa dengan nilai total yang rendah menunjukkan bahwa minimnya data maupun informasi yang disajikan di web desa dan kualitas pelayanan dalam website tersebut, terdapat beberapa Informasi yang belum terupdate secara berkala serta penyediaan pelayanan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan data yang didapatkan di Desa Tapak Kabupaten Magetan bisa dikatakan menurunnya kualitas dari Pelayanan publik melalui website di Desa Tapak. Sehingga apakah website pemerintah Desa Tapak sudah merupakan implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dimaksudkan efektif dan efisien, serta apa yang menjadi penghambat dalam menerapkannya? Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik mengambil judul “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan”. Penelitian ini berorientasi pada sejauhmana pelayanan berbasis online yang disediakan di website tersebut dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat Di Desa Tapak Kabupaten Magetan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang di atas, maka peneliti dapat menemukan rumusan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan?

2. Apa saja faktor penghambat pemerintah desa dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah desa dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dalam melakukan penelitian atau karya ilmiah yang serupa terkait dengan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai pengertian serta manfaat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik dan juga bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan peneliti serta mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah peneliti dapatkan.

1.5 Definisi Konseptual

Salah satu komponen penelitian adalah definisi konseptual, yang memberikan penjelasan tentang karakteristik dari masalah yang akan diteliti. Definisi konseptual sering kali merupakan tahap awal dalam proses penelitian di mana peneliti mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang akan dibahas dan

dianalisis dalam studi. Ini membantu peneliti menjadi lebih fokus dan terarah saat menjelaskan kasus yang ditulis dalam penelitian terkait “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan”.

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah salah satu bentuk transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. SPBE memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menggantikan proses manual dengan layanan berbasis digital. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna utama sistem ini. SPBE hadir untuk menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di era digital, seperti inefisiensi birokrasi, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya akuntabilitas dalam pelayanan publik (Amanda Bilqis, 2018).

2. Pelayanan Publik

Menurut David Osborne, pelayanan publik mencakup berbagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Osborne menekankan bahwa pelayanan publik yang baik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, responsif terhadap kebutuhan yang berkembang, memberikan pilihan yang beragam, dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pandangan David Osborne menempatkan pelayanan publik sebagai elemen kunci dalam pemerintahan yang harus senantiasa ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat. Responsivitas, pilihan yang beragam, dan akuntabilitas adalah fondasi utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam merancang dan menjalankan layanan publik. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan teknologi serta inovasi, pemerintah dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat luas (Oman Riam, 2019)..

1.6 Definisi Operasional

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan merupakan upaya untuk menerapkan sebuah sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memanfaatkan teknologi web guna meningkatkan pelayanan, aksesibilitas dan ketersediaan informasi bagi masyarakat dan pemerintah setempat di Desa Tapak. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data desa, termasuk data penduduk, infrastruktur, beberapa layanan ke dalam sebuah platform berbasis web yang dapat diakses secara mudah dan transparan oleh seluruh masyarakat (Ahmad et al., 2022). Pada penelitian Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan, adapun beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai variabel data untuk dianalisis, yaitu :

1. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang lebih menekankan analisis dan deskripsi (Atthahara, n.d.). Dalam proses penelitian kualitatif, hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan, dan landasan teori digunakan sebagai pemandu agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan. Studi ini mengambil pendekatan kualitatif dengan sementara ini masih menggunakan metode observasi dan literatur yang lebih mendalam dan terperinci dalam proses pengumpulan data. Hal ini diperlukan untuk melakukan pengamatan untuk memiliki pemahaman tentang kasus yang merupakan subjek utama penelitian. Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah analisis kinerja pemerintah dalam menerapkan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna mendukung pelayanan publik berbasis web Di Desa Tapak Kabupaten Magetan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tapak Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Yang mendasari mengapa penelitian ini dilakukan di desa Tapak, Karena praktik inovasi tersebut dilakukan di Balai Desa, sehingga peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat dilakukannya sebuah penelitian untuk melihat secara langsung bagaimana kinerja pemerintah desa dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan melihat secara langsung kendala dan hambatan yang perlu adanya perbaikan dari pelayanan melalui website di Desa Tapak Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian. Artinya, subjek ini sangat ahli atau memang berada dalam tempat penelitian tersebut sehingga jawaban atau opini yang disampaikan sangat memengaruhi hasil penelitian si peneliti (Ramadhan, 2024). Dalam penelitian ini menentukan subjek sebagai berikut :

- a. Kepala Desa
- b. Perangkat Desa (3)
- c. Masyarakat (4)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendukung fokus penelitian pada Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Desa Tapak, Kabupaten Magetan, mencakup berbagai metode yang dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang pengalaman dan persepsi masyarakat serta kinerja sistem informasi desa berbasis web. Penulis melakukan pengumpulan data untuk memperoleh data-data di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, kegiatan, atau fenomena tertentu tanpa campur tangan atau pengaruh dari peneliti (Rogate Telaumbanua et al., 2022). Dalam konteks penelitian, observasi dapat dilakukan untuk mendokumentasikan situasi atau peristiwa yang diamati, mengamati pola-pola yang muncul, dan memahami interaksi antara berbagai variabel. Dalam penelitian tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Desa Tapak, observasi dapat dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik faktor penghambat dan pendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap layanan yang disediakan di website. Observasi dapat dilakukan secara langsung di lapangan atau melalui analisis data penggunaan sistem.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan dan diskusi langsung antara peneliti dan responden (Nurrahman et al., 2021). Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan pendapat responden terkait dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Desa Tapak, wawancara dapat dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk pejabat desa, staf administrasi, anggota masyarakat, dan pengguna aktif layanan desa berbasis web. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang pengalaman dan pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Desa Tapak, Kabupaten Magetan.

c. Studi Literatur

Teknik pengumpulan data atau studi literature guna memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan dan penelusuran terkait bacaan-bacaan yang telah dituang oleh peneliti peneliti terdahulu yaitu mengenai transformasi digital serta pengembangan sumber daya manusia

dalam ranah pemerintahan (Tui et al., 2022). Dengan teknik pengumpulan data melalui studi literature peneliti mengharapkan mampu mengumpulkan konsep maupun teori-teori, dokumen atau literature lainnya.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau hasil dari mencatat, menyimpan, dan menyusun informasi atau data secara tertulis atau dalam bentuk lain yang dapat diakses dan digunakan untuk berbagai tujuan (Mozin & Isa, 2023). Dalam konteks penelitian, dokumentasi merujuk pada catatan atau rekaman yang dibuat oleh peneliti untuk mendokumentasikan proses penelitian, temuan, dan analisis yang dilakukan selama studi. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data terhadap dokumentasi artikel dan dokumen administratif yang dimiliki oleh pemerintahan desa Tapak. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data mengenai peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Magetan mengenai penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik desa berbasis Web.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses analisis data pada penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data. Teknik analisis data merupakan langkah penting dalam menginterpretasi informasi yang dikumpulkan dalam penelitian (Mohi & Mahmud, 2018). Dalam konteks penelitian, teknik analisis data membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji dan membuat kesimpulan yang didukung oleh bukti empiris. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan wawasan dan pengetahuan yang berharga tentang topik yang diteliti. Maka dari itu analisa yang dipergunakan ialah :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian (Aris et al., 2021). Biasanya, reduksi data

ini dibantu dengan beberapa alat bantu yang memudahkan pekerjaan peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian setelah melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian. Reduksi data merupakan salah satu dari berbagai jenis proses pengolahan data pada penelitian yang dilakukan seorang peneliti untuk memroses berbagai data hasil dari penelitian di lapangan yang sudah dikumpulkan dan juga ditemukan, sebelum akhirnya digunakan sebagai laporan dalam data penelitian mengenai Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna mendukung Pelayanan Publik berbasis web Di Desa Tapak Kabupaten Magetan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dalam bentuk narasi teks yang disertai dengan beberapa gambar, data, maupun diagram yang mendukung penelitian ini. Sajian data yang dilakukan ialah secara deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan uraian hasil wawancara bersama narasumber maupun informan yang telah disesuaikan dengan fenomena maupun indikator sosial yang telah ditemukan dan diobservasi selama proses penelitian (Erlianti et al., 2019).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai (Riskha Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022). Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel.